

Tantangan Dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global

Aulia Ramadhanty

Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210413020@mahasiswa.upnvj.ac.id

Neysa Naila

Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210413130@mahasiswa.upnvj.ac.id

Ardli Johan Kusuma

Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: ardli.johank@upnvj.ac.id

Korespondensi penulis: 2210413020@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *Women's political participation is a key factor in achieving an inclusive and equitable democracy. This research aims to investigate the role of women in increasing political participation and democracy in Sweden. Qualitative research is used to understand complex and subjective cases by collecting descriptive and unstructured data. The results show that Sweden has achieved significant progress in women's political participation. The country has consistently championed gender equality and ranks fourth in the 2020 Global Gender Gap Index. The gender equality approach as a cornerstone of its politics has brought significant changes in the role of women in politics and government policy. Sweden also acts as a global change agent in promoting gender equality values. The research also identified that gender gaps still exist in Sweden, influenced by structural barriers, political institutions and political culture. Sweden has used quota mechanisms and women's competency preparation to increase women's representation in parliament. However, there is still work to be done to fully address gender inequality. Sweden is an inspiring country in the fight for gender equality and women's empowerment in politics. Quota efforts, competency preparation, and community support are important steps in increasing women's representation in Swedish politics. Gender concepts and feminist perspectives have become the basis for policies that support women to participate in politics, ensure gender equality, and create a more inclusive and fair political environment for everyone.*

Keywords: *Women's political participation, Gender equality, Sweden.*

Abstrak: Partisipasi politik perempuan adalah faktor kunci untuk mencapai demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran perempuan dalam meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi di Swedia. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami kasus yang kompleks dan subjektif dengan mengumpulkan data deskriptif dan tidak terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Swedia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam partisipasi politik perempuan. Negara ini secara konsisten memperjuangkan kesetaraan gender dan menempati peringkat keempat dalam Global Gender Gap Index 2020. Pendekatan kesetaraan gender sebagai landasan politiknya telah membawa perubahan signifikan dalam peran perempuan dalam politik dan kebijakan pemerintah. Swedia juga berperan sebagai agen perubahan global dalam mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kesenjangan gender masih ada di Swedia, dipengaruhi oleh hambatan struktural, institusi politik, dan budaya politik. Swedia telah menggunakan mekanisme kuota dan persiapan kompetensi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, masih ada upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender sepenuhnya. Swedia menjadi negara inspiratif dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam politik. Upaya kuota, persiapan kompetensi, serta dukungan masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di politik Swedia. Konsep gender dan perspektif feminis telah menjadi dasar untuk kebijakan yang mendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, menjamin kesetaraan gender, dan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang.

Kata Kunci: Partisipasi politik perempuan, Kesetaraan gender, Swedia.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik dan demokrasi merupakan unsur kunci dalam perkembangan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dalam beberapa dekade terakhir, suatu agenda global, masalah kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses politik telah menjadi perhatian utama. Terdapat pemahaman yang semakin mendalam mengenai betapa pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam politik untuk mencapai sistem demokrasi yang lebih kuat dan representatif. Swedia, sebagai salah satu negara dengan sejarah panjang dalam menerapkan kebijakan kesetaraan gender, telah menjadi objek studi yang menarik dalam konteks ini. Negara ini telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi politik perempuan, dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Sebagai negara dengan sistem politik demokrasi yang mapan, Swedia memberikan contoh bagaimana kebijakan dan praktik yang mendukung perempuan dalam politik dapat mempengaruhi partisipasi politik dan demokrasi secara keseluruhan. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di panggung politik Swedia. Ketidaksetaraan dalam representasi di level tertinggi, stereotip gender yang masih melekat, serta perbedaan pengalaman dalam menghadapi hambatan politik menjadi sejumlah masalah yang masih perlu ditangani dengan serius.

Peran perempuan dalam konteks global partisipasi politik dan demokrasi memiliki dampak yang signifikan dalam memastikan representasi yang inklusif dan keadilan gender dalam pengambilan keputusan politik. Memahami peran ini sangat penting karena menyoroti ketidaksetaraan yang masih ada dalam lingkup politik dan mengidentifikasi cara-cara untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai partisipasi politik yang penuh. Konsep gender dan perspektif feminis dalam analisis politik memainkan peran penting dalam mengeksplorasi dinamika kekuasaan, hubungan kekuatan, dan pengaruh sosial dalam politik. Di Swedia, sejarah politiknya tercermin dalam pendekatan inklusif terhadap gender dan kesetaraan. Konsep gender dan perspektif feminis telah memengaruhi pembentukan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, termasuk dalam konteks partisipasi politik perempuan di Swedia.

Menurut Global Gender Gap Index 2020, data statistik menunjukkan bahwa Swedia telah memperjuangkan kesetaraan gender dan telah melakukan kemajuan besar dalam partisipasi politik perempuan. negara ini berada di peringkat keempat dalam hal kesetaraan gender. Peluang ekonomi dan partisipasi, pencapaian pendidikan, kelangsungan hidup, dan kesehatan, dan pemberdayaan politik, semua memengaruhi peringkat ini. Semakin kecil jarak yang ada antara indikator-indikator ini, semakin tinggi posisi kesetaraan gender suatu negara.

Menurut data statistik pada tahun 2018, Parlemen Swedia terdiri dari 46.1% perempuan dari total 349 anggota, dengan 165 perempuan terpilih melalui pemilihan umum pada tahun tersebut. Di posisi strategis lainnya, 54.5% perempuan di Swedia menempati jabatan sebagai menteri. Sementara itu, 36.1% perempuan berhasil menduduki posisi di dewan direksi berbagai perusahaan. Dalam konteks pendidikan, 48% dari semua mahasiswa tingkat doktoral (S3) di Swedia adalah perempuan (Statista, 2019)

Tinjauan mendalam terhadap Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik perempuan Swedia menjadi sangat penting untuk membuat kebijakan yang lebih baik untuk mendorong inklusi dan kesetaraan gender, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif bagi semua orang dengan memahami kesulitan yang dihadapi dan kesuksesan yang telah dicapai. Namun, meskipun prestasi Swedia dalam pemberdayaan perempuan dalam politik telah mencapai tingkat yang mengesankan, masih ada pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana perempuan di Swedia memainkan peran kunci dalam meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi? Apa faktor-faktor yang telah berkontribusi pada keberhasilan Swedia dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik, dan apa implikasinya terhadap sistem politiknya?

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran perempuan dalam meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi di Swedia. Melalui analisis yang mendalam, proposal ini akan menjelajahi dampak kebijakan kesetaraan gender Swedia dan upaya perempuan dalam politik terhadap proses politik dan demokrasi di negara tersebut. Melalui pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana Swedia berhasil memanfaatkan potensi perempuan dalam politik, kita dapat menggali pelajaran berharga untuk diterapkan dalam konteks global, dan dengan demikian, memperkuat dasar partisipasi politik dan demokrasi yang lebih inklusif dan adil.

Peran perempuan dalam konteks global partisipasi politik dan demokrasi memiliki dampak yang signifikan dalam memastikan representasi yang inklusif dan keadilan gender dalam pengambilan keputusan politik. Memahami peran ini sangat penting karena menyoroti ketidaksetaraan yang masih ada dalam lingkup politik dan mengidentifikasi cara-cara untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai partisipasi politik yang penuh. Konsep gender dan perspektif feminis dalam analisis politik memainkan peran penting dalam mengeksplorasi dinamika kekuasaan, hubungan kekuatan, dan pengaruh sosial dalam politik. Di Swedia, sejarah politiknya tercermin dalam pendekatan inklusif terhadap gender dan kesetaraan. Konsep gender dan perspektif feminis telah memengaruhi pembentukan kebijakan

yang mendukung kesetaraan gender, termasuk dalam konteks partisipasi politik perempuan di Swedia. Data statistik menunjukkan bahwa Swedia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam partisipasi politik perempuan. Meskipun demikian, faktor-faktor seperti kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, akses pendidikan, dukungan dari partai politik, dan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik perempuan telah mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam politik. Tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik Swedia termasuk ketidaksetaraan dalam representasi di level tertinggi, stereotip gender, dan perbedaan pengalaman dalam menghadapi hambatan politik. Namun, keberhasilan telah tercapai melalui langkah-langkah kebijakan yang progresif, inklusif, dan adopsi strategi untuk meningkatkan representasi perempuan di semua tingkatan politik. Memahami kompleksitas peran perempuan dalam partisipasi politik dan demokrasi memungkinkan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong inklusi dan kesetaraan gender dalam politik. Untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan representatif bagi semua orang, baik di Swedia maupun di seluruh dunia, sangat penting bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

KAJIAN TEORI

Berbagai penelitian terdahulu yang menjadi dasar referensi dalam penelitian kami tentang peran partisipasi perempuan dalam politik menggambarkan perkembangan perjuangan hak-hak perempuan sejak era R.A Kartini hingga masa kini. Tedjo (2022) mengulas perjuangan hak-hak perempuan sejak masa R.A Kartini, sedangkan Kiftiah (2019) menyoroti posisi perempuan dalam politik Indonesia, termasuk dalam konteks agama dan undang-undang yang ada. Sementara itu, Nurcahyono (2016) membahas partisipasi perempuan dalam politik pada masa kini, dengan fokus pada perubahan positif sejak era reformasi. Fitriah Nurul et al. (2022) menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, Irayomi (2021) mengatakan bahwa kebijakan feminis Swedia di luar negeri mencerminkan semangat domestik negara dalam mendorong kesetaraan gender di seluruh dunia.

Dalam penelitian kami, kami memfokuskan pada peran partisipasi perempuan dalam politik Swedia sebagai negara dengan kesetaraan gender tertinggi. Kami mengambil inspirasi dari penelitian terdahulu untuk menambah pemahaman tentang pentingnya peran perempuan dalam partisipasi politik serta untuk menghilangkan sistem patriarki dalam konteks politik. Dari literatur yang disebutkan, kami memperoleh wawasan yang relevan dan berharga tentang bagaimana peran perempuan dalam politik berkembang dari masa ke masa serta berbagai faktor

yang mempengaruhinya, baik dari segi budaya, agama, undang-undang, maupun kebijakan luar negeri yang mengadvokasi kesetaraan gender. Selain itu kami mengambil tinjauan pustaka untuk literatur kami seperti;

TINJAUAN PUSTAKA

A. Demokrasi dan Partisipasi Politik

Dalam sistem politik di mana rakyat memegang kekuasaan politik, demokrasi adalah konsep utama. (Rangkuti, 2023). Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, kesetaraan hak politik, dan pemerintahan yang berdasarkan pemilihan bebas dan adil. Konsep dasar demokrasi menekankan pentingnya partisipasi politik dari berbagai elemen masyarakat untuk mencapai pengambilan keputusan yang inklusif dan adil. Partisipasi politik adalah kunci dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi ini. Ada berbagai jenis partisipasi politik yang mencakup spektrum luas dari tindakan politik. Hal ini mencakup partisipasi tradisional, seperti memilih dalam pemilihan umum, berpartisipasi dalam partai politik, atau melakukan kampanye politik. Di sisi lain, ada partisipasi politik yang lebih tidak konvensional, seperti protes jalanan, kampanye aktivis, atau partisipasi dalam forum warga. Semua bentuk partisipasi ini memiliki peran dalam mendukung prinsip-prinsip demokrasi, meskipun dalam tingkat yang berbeda.

Hubungan antara partisipasi politik dan demokrasi sangat erat. Partisipasi politik adalah cara rakyat mengartikulasikan kepentingan mereka, mengambil bagian dalam pembuatan keputusan, dan mengawasi pemerintah. Ini membantu mencegah akumulasi kekuasaan yang tidak sehat dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan keinginan rakyat. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah sarana utama di mana demokrasi diaktualisasikan. Namun, hubungan ini juga saling mendukung. Demokrasi yang kuat, dengan perlindungan hukum yang efektif dan kebebasan sipil, dapat mendorong partisipasi politik yang lebih besar. Sebaliknya, partisipasi politik yang aktif dapat memperkuat sistem demokrasi dengan menciptakan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemerintah dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat. Dengan kata lain, partisipasi politik dan demokrasi adalah elemen-elemen yang saling mempengaruhi, dan keduanya esensial dalam menjaga pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokratis.

B. Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan merupakan aspek penting dalam perkembangan sistem politik yang inklusif dan representatif. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan partisipasi politik perempuan telah menjadi sorotan global, didorong oleh kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Peran perempuan dalam politik

bukan hanya sebuah isu hak asasi manusia, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam memperkuat demokrasi. Partisipasi politik perempuan telah mengalami perubahan yang signifikan sepanjang sejarah, mencerminkan perjuangan yang panjang menuju kesetaraan gender dalam politik. Selandia Baru menjadi negara pertama yang memberi wanita hak suara dalam pemilihan umum pada tahun 1893. Ini memulai transformasi dalam partisipasi politik perempuan di seluruh dunia (Garbaye, 2012). Amerika Serikat mengikutinya pada tahun 1920.

Pada tahun-tahun berikutnya, momentum kesetaraan gender semakin bertumbuh. Prancis, pada tahun 1944, dan Argentina, pada tahun 1947, mengambil langkah penting dengan memberikan hak suara kepada perempuan. Swiss, yang terkenal dengan tradisi politiknya yang konservatif, tidak memberikan hak suara kepada perempuan hingga tahun 1971, menandai perubahan signifikan dalam pemikiran politik (World suffrage timeline, 2023). Kemudian, pada tahun 2015, Saudi Arabia memberikan hak suara kepada perempuan untuk pertama kalinya, mengakhiri larangan bersejarah terhadap partisipasi politik perempuan di negara tersebut. Sejarah ini menunjukkan bagaimana perjuangan perempuan dalam politik telah membuka pintu bagi kesetaraan dan perwakilan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan politik di seluruh dunia. Meskipun tantangan masih ada, prestasi ini menunjukkan pentingnya perjuangan berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan gender dalam partisipasi politik secara global.

Perempuan membawa perspektif unik ke dalam arena politik, yang dapat memperkaya debat, menghasilkan kebijakan yang lebih seimbang, dan menciptakan representasi yang lebih baik bagi masyarakat. Partisipasi perempuan dalam politik mencakup tidak hanya pemilih dan calon politik perempuan, tetapi juga mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik di semua tingkatan pemerintahan. Ini termasuk peran dalam organisasi politik, advokasi, dan akses yang sama terhadap peluang politik. Namun, kendala dan hambatan terus mewarnai partisipasi politik perempuan di berbagai negara. Terkadang, faktor sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan hukum dapat menjadi penghalang bagi keterlibatan perempuan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong reformasi politik yang mendukung kesetaraan gender, seperti kuota perempuan dalam lembaga legislatif, pendidikan politik yang inklusif, dan dukungan yang memadai bagi perempuan yang terlibat dalam politik.

C. Gender dan Politik

Gender didefinisikan sebagai perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh perilaku, fungsi, dan peran masing-masing, yang ditentukan oleh budaya dan kebiasaan. Kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia untuk memenuhi peran mereka, dan berpartisipasi dalam

politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional. Ini berarti mereka memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan baik. Salah satu komponen kesetaraan gender adalah penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki dan perempuan. Gender sangat relevan dalam politik karena politik adalah tempat di mana kekuasaan dan keputusan terjadi, dan gender mempengaruhi cara orang memahami dan mempraktekkan kekuasaan dan keputusan tersebut.

Perspektif feminis dalam analisis politik menekankan pentingnya memperhatikan peran gender dalam politik. Feminisme budaya menekankan bahwa perbedaan gender tidak hanya muncul melalui konstruksi sosial dan budaya, tetapi juga mempengaruhi perempuan dari dalam. Oleh karena itu, feminisme budaya juga dapat dikatakan sebagai gerakan yang menjaga sifat-sifat perempuan dengan cara mewujudkan masyarakat yang damai, saling membantu, mencapai kehidupan yang damai tanpa penindasan, dan pada akhirnya menciptakan kesetaraan gender. Perspektif feminis dalam analisis politik juga menekankan pentingnya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik, seperti hak suara dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Sejarah politik Swedia menunjukkan bahwa perempuan telah memainkan peran penting dalam politik. Pada tahun 1921, perempuan diizinkan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum di Swedia (Hoverborg, 2021). Pada tahun 2021, Swedia memiliki kabinet pertama yang dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Perdana Menteri Magdalena Andersson. Selain itu, Swedia juga memiliki kuota 40% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif (Fatmariza, 2005). Peran perempuan dalam sejarah politik Swedia menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan politik suatu negara.

D. Model Swedia dalam Pemberdayaan Perempuan

Swedia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam menjalankan kebijakan luar negeri feminis yang memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesetaraan gender secara global. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat hak-hak perempuan dan pemberdayaan mereka melalui pendekatan yang sangat terfokus pada perspektif gender di seluruh bidang kebijakan luar negerinya. Dengan menggunakan EU Gender Action Plan 2016–2020 (GAP II), Swedia memastikan bahwa Uni Eropa terlibat dalam masalah pemberdayaan perempuan yang mendorong negara-negara di Uni Eropa untuk mengambil tindakan yang lebih konkret dalam mencapai kesetaraan gender. Dampak dari kebijakan ini terlihat jelas di dalam negeri Swedia. Perempuan di Swedia berhasil mencapai posisi-posisi penting dalam pemerintahan, termasuk sebagai menteri. Selain itu, sekitar 36,1% perempuan di Swedia

menduduki posisi dewan direksi di berbagai perusahaan, menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang tinggi dalam dunia bisnis (Swedish Institute, 2023). Swedia juga mencatat sejarah dengan memiliki pemerintahan feminis pertama di dunia. Implementasi berkelanjutan dari perspektif gender dalam berbagai bidang di Swedia adalah bukti nyata bahwa pendekatan ini dapat berhasil. Swedia percaya bahwa model ini dapat diterapkan di negara-negara lain untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan gender di seluruh dunia. Dengan komitmen yang kuat untuk kesetaraan gender, Swedia memberikan contoh yang menginspirasi bagi negara-negara lain dalam upaya mempromosikan hak-hak dan partisipasi politik perempuan secara lebih luas di seluruh dunia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan metodologi kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kasus yang kompleks dan subjektif melalui pengumpulan data yang deskriptif dan tidak terstruktur. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berbasis filosofi, digunakan untuk penelitian dalam lingkungan ilmiah (eksperimental), di mana peneliti berfungsi sebagai alat dan penelitian lebih menekankan pada analisis kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan induktif, penelitian kualitatif memfokuskan pada interpretasi dan pemahaman makna data. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman subjek. Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi pustaka. Dengan kata lain, mengumpulkan data dengan melihat literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka adalah metode yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan informasi, terutama dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang subjek penelitian. Studi pustaka juga mengacu pada metode pengumpulan data melalui penelitian literatur, buku, arsip, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan subjek penelitian (Nazir, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik perempuan memiliki implikasi signifikan dalam konteks global partisipasi politik dan demokrasi, dan hal ini juga terjadi di Indonesia. Meskipun demokratisasi telah menjadi fokus utama di banyak negara, keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia masih di bawah 30%, menciptakan tantangan bagi keberlanjutan dan inklusivitas demokrasi (Kemenko PMK, 2021). Peningkatan partisipasi perempuan di arena politik bukan hanya tentang mencapai keseimbangan gender semata, melainkan juga tentang memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan keberagaman dan kebutuhan seluruh masyarakat. Pentingnya

meningkatkan partisipasi perempuan tidak hanya terletak pada aspek kuantitatif, tetapi juga pada dampak substansial yang dimilikinya. Perempuan membawa perspektif yang unik dan berharga dalam proses pengambilan keputusan politik. Melibatkan lebih banyak perempuan dalam Parlemen dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif, terutama terkait dengan isu-isu perempuan dan anak. Dengan demikian, peningkatan partisipasi perempuan tidak hanya memperkaya representasi politik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dengan memastikan inklusivitas dan keberlanjutan (Wahyudi, 2018). Memahami peran perempuan dalam politik juga memungkinkan pembentukan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Tidak dapat diabaikan bagaimana peran perempuan dalam menyatukan pandangan tentang kemajuan demokrasi yang sehat dan dapat dicapai. Pentingnya mengakui dan menghormati kontribusi perempuan dalam ranah politik adalah langkah esensial untuk mencapai kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan. Dengan memperkuat peran perempuan dalam politik, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan dasar yang kokoh untuk perkembangan masyarakat yang inklusif dan demokratis .

Swedia berada di peringkat keempat dalam hal kesetaraan gender menurut Global Gender Gap Index 2020, meskipun negara ini secara konsisten mendukung kesetaraan gender. Banyak faktor memengaruhi peringkat ini, seperti peluang ekonomi dan partisipasi, pencapaian pendidikan, kesetaraan gender, kelangsungan hidup dan kesehatan, dan pemberdayaan politik. Kesetaraan gender dalam suatu negara berkorelasi positif dengan tingkat ketidaksamaan antara indikator-indikator ini. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 46.1% perempuan di Parlemen Swedia dari total 349 anggota, dan 165 perempuan terpilih melalui pemilihan umum. Selain itu, 54.5% perempuan Swedia menjabat sebagai menteri. Meskipun demikian, 36.1% wanita dapat menduduki posisi di dewan direksi perusahaan yang berbeda (Statista, 2019). Selain itu, Swedia dikenal memiliki pemerintahan feminis pertama di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan dan pembagian sumber daya. Pemerintahan feminis menjamin bahwa perspektif kesetaraan gender dimasukkan ke dalam kebijakan nasional dan internasional. Konsekuensinya adalah bahwa kedua jenis kelamin harus memiliki peran yang sama dalam membentuk masyarakat dan kehidupan mereka. Ini dianggap sebagai masalah demokrasi dan keadilan serta hak asasi manusia. (Åsa Lindhagen, 2019).

Kesetaraan gender, khususnya di negara-negara kesejahteraan modern, juga dipandang sebagai bagian dari solusi terhadap tantangan sosial masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan pembangunan ekonomi. Salah satu alat utama pemerintah untuk

menerapkan kebijakan feminis adalah pengarusutamaan gender, dan perencanaan anggaran yang peka gender adalah bagian penting dari proses tersebut. Swedia juga telah membentuk badan khusus bernama Discriminatingsombudsmannen atau Equality Ombudsman (DO), yang bertugas melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk diskriminasi. Ombudsman Kesetaraan ini bekerja untuk melawan diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, asal etnis, agama, disabilitas, dan perbedaan lainnya (Sweden G.O., 2019). Mereka meninjau keluhan terkait diskriminasi serta mengevaluasi upaya perusahaan, institusi pendidikan tinggi, dan sekolah dalam mencegah diskriminasi. Kesetaraan gender di berbagai wilayah di Swedia tidak terlepas dari berbagai upaya yang memberikan kemudahan bagi perempuan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Kurangnya dukungan politik terhadap integrasi pekerjaan-keluarga sering kali menyebabkan perempuan harus memilih antara karier atau pengasuhan anak. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk membuat kebijakan yang ramah keluarga, mendorong kesetaraan gender, dan memberikan perempuan kebebasan dan kesempatan yang sama dalam karier. Swedia diakui sebagai pelopor dalam pemerintah akan mengembangkan kebijakan yang ramah terhadap perempuan, seperti pembiayaan dan penyediaan layanan pengasuhan anak, cuti melahirkan dan perawatan di rumah, dukungan kerja paruh waktu, dan sistem perpajakan yang tidak membebani kepala rumah tangga. Swedia terkenal dengan pajaknya yang tinggi yang dijalankan oleh Badan Pajak Swedia (Skatteverket), yang memiliki reputasi baik dalam survei tahun 2019 yang dilakukan oleh lembaga riset pasar sebagai salah satu dari sembilan badan publik terbaik dari 40 besar di Swedia. Kebijakan Swedia juga termasuk langkah-langkah anti diskriminasi dan afirmatif yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan, serta mempertimbangkan hubungan antara ketimpangan pendapatan rumah tangga dan tingkat pekerjaan perempuan. Di Swedia, beberapa kebijakan ramah perempuan yang berhasil diterapkan termasuk cuti orang tua (cuti orang tua) dan perawatan anak publik.

Swedia mendukung kesetaraan gender dalam politiknya, percaya bahwa semua orang harus memiliki hak yang sama. Selain itu, Swedia adalah negara pertama yang memiliki pemerintahan feminis di mana kesetaraan gender menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian sumber daya. Kebijakan luar negeri yang diilhami oleh ideologi feminis Swedia telah membantu mencapai kebebasan penuh dan kesetaraan gender. Swedia juga aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui berbagai upaya, termasuk melalui kebijakan luar negeri feminis dan partisipasi dalam pemilu (Siregar, 2021).

Swedia, dengan pendekatan kesetaraan gender sebagai landasan politiknya, telah menciptakan perubahan signifikan dalam peran perempuan dalam sejarah politiknya. Sebagai

pelopor kesetaraan gender, Swedia menegaskan prinsip bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, yang merupakan ide dasar bagi feminis. Pemahaman ini tercermin dalam keputusan mereka untuk menjadi negara pertama dengan pemerintahan feminis, di mana kebijakan dan alokasi sumber daya dikembangkan dengan memprioritaskan kesetaraan gender. Kebijakan luar negeri feminis Swedia memainkan peran penting dalam mencapai kemajuan nyata dalam pencapaian kesetaraan gender dan kebebasan penuh dalam realisasi hak asasi. Swedia tidak hanya menerapkan prinsip kesetaraan di dalam negeri, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan global. Melalui upaya diplomasi feminis dan partisipasi aktif dalam pemilu, Swedia berusaha menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender di tingkat internasional (Larasati, 2018).

Meskipun Swedia telah mencapai banyak keberhasilan, kenyataannya masih terdapat kesenjangan gender yang perlu diatasi. Kesadaran akan tantangan ini menunjukkan bahwa kendati telah mencapai kemajuan yang signifikan, Swedia terus berkomitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memastikan bahwa semua warganya, tanpa memandang jenis kelamin, dapat menikmati hak-haknya dengan sepenuhnya. Dengan demikian, Swedia menjadi model inspiratif bagi negara-negara lain yang berupaya menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penurunan partisipasi perempuan dalam politik dan parlemen dapat dikaitkan dengan tiga aspek utama, sebagaimana yang dijelaskan dalam literatur budaya politik, hambatan struktural, dan institusi politik (Lovenduski, Campbell, & Sampson-Jacents, 2002). Menurut Reynolds (1999), elemen struktural ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komposisi gender dalam konteks politik. Ini disebabkan fakta bahwa laporan PBB yang menyoroti kemajuan kesetaraan gender di bidang ekonomi, pendidikan, harapan hidup, dan kesehatan, seringkali dikaitkan dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen (Norris & Inglehart, 2001). Tantangan yang dihadapi perempuan dalam konteks politik Swedia mungkin terkait dengan masalah-masalah yang umum dihadapi perempuan dalam politik, seperti kesetaraan gender dan representasi yang masih belum memuaskan secara global. Namun, Swedia telah berhasil mencapai keterwakilan perempuan yang tinggi di parlemen, yang menunjukkan keberhasilan dalam memfasilitasi partisipasi politik perempuan.

Studi yang dilakukan tentang variabel yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Swedia menunjukkan bahwa ada banyak variabel yang berperan. Kuota yang diatur oleh undang-undang dan digunakan secara sukarela oleh partai politik, adalah salah satu cara yang efektif untuk menjamin akses perempuan ke kekuasaan politik. Swedia adalah salah satu negara yang menggunakan kuota. Kemampuan perempuan juga penting. Swedia telah melakukan upaya untuk mendidik perempuan untuk menjadi mahir dalam politik dan

membangun sistem yang membuat laki-laki merasa malu untuk disingkirkan. Selain itu, kepercayaan liberal Swedia yang menganggap laki-laki dan perempuan perlu diperlakukan setara juga memengaruhi partisipasi politik perempuan di negara itu.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Swedia. Salah satunya adalah melalui penerapan mekanisme kuota yang telah terbukti efektif dalam menjamin akses perempuan ke kekuasaan politik. Swedia dapat terus mendorong partai politik untuk menerapkan kuota perempuan dalam struktur kepemimpinan dan pencalonan, sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, upaya untuk mempersiapkan kalangan perempuan agar kompeten dalam bidang politik juga perlu terus ditingkatkan. Swedia telah melakukan upaya untuk mempersiapkan sistem yang membuat laki-laki sedikit malu untuk menyingkir, namun upaya ini perlu terus ditingkatkan agar perempuan semakin percaya diri dan mampu bersaing dalam dunia politik. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Swedia. Masyarakat dapat terus mendorong partai politik untuk menerapkan kuota perempuan dalam struktur kepemimpinan dan pencalonan, serta memberikan dukungan kepada perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Selain itu, masyarakat juga dapat memperjuangkan hak-hak perempuan dan membangun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam politik dan kehidupan sehari-hari. Tidak mengherankan bahwa Swedia adalah salah satu negara yang paling berkomitmen terhadap kesetaraan gender, meskipun negara ini memiliki banyak komunitas yang mendukung dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Swedia telah memperlihatkan komitmen terhadap kesetaraan gender melalui kebijakan yang mendorong partisipasi politik perempuan. Hal ini termasuk peningkatan keterwakilan perempuan dalam struktur politik dan pemerintahan. Kendati Swedia telah mencapai banyak kemajuan dalam kesetaraan gender, masih ada kesenjangan yang perlu diatasi. Kesadaran akan tantangan ini menunjukkan komitmen Swedia untuk terus mengatasi ketidaksetaraan gender. Faktor-faktor seperti hambatan struktural, institusi politik, dan budaya politik mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Upaya kuota perempuan, persiapan kompetensi, dan ideologi liberal merupakan faktor yang berperan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di politik Swedia. Swedia dapat terus mendorong penerapan kuota perempuan dan mempersiapkan kalangan perempuan secara kompeten dalam politik. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada perempuan yang mencalonkan diri serta memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, di Swedia, konsep gender dan perspektif feminis telah memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan yang mendukung partisipasi

politik perempuan, memastikan kesetaraan gender, serta menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

KESIMPULAN

Partisipasi politik perempuan memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks global partisipasi politik dan demokrasi, yang tercermin baik di Indonesia maupun di Swedia. Di Indonesia, keterwakilan perempuan di Parlemen yang masih di bawah 30% menimbulkan tantangan bagi keberlanjutan dan inklusivitas demokrasi. Namun, peningkatan partisipasi perempuan di politik bukan hanya tentang mencapai keseimbangan gender, melainkan juga memastikan keberagaman dalam pengambilan keputusan politik. Swedia, sebagai pelopor kesetaraan gender, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kebijakan yang ramah perempuan. Pendekatan kesetaraan gender sebagai landasan politiknya telah membawa perubahan signifikan dalam peran perempuan dalam politik dan kebijakan pemerintah. Swedia tidak hanya menerapkan prinsip kesetaraan di dalam negeri tetapi juga berperan sebagai agen perubahan global dalam mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender. Meskipun Swedia telah mencapai kemajuan signifikan, kesenjangan gender masih ada. Faktor-faktor seperti hambatan struktural, institusi politik, dan budaya politik mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Swedia telah menggunakan mekanisme kuota dan persiapan kompetensi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, masih ada upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender sepenuhnya. Dengan demikian, Swedia merupakan negara inspiratif bagi negara lain dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam politik. Upaya kuota, persiapan kompetensi, serta dukungan masyarakat merupakan langkah penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di politik Swedia. Konsep gender dan perspektif feminis telah menjadi pijakan dalam pembentukan kebijakan yang mendukung partisipasi politik perempuan, memastikan kesetaraan gender, dan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang.

REFERENCE

- Fatmariza. Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif Di Sumatera Barat Pasca Quota 30%. DEMOKRASI, Vol. 4 (1), 49 – 61.
- Garbaye, L. (2012). Women's Voting Rights in 18th-Century New Jersey Electoral Reforms: Opacity and Transparency. XVII-XVIII, 69 | 2012, 230-245.
- Hoverberg, E. (2021, Juni 4). 100 Years of Women's Suffrage in Sweden. Library of Congress Blog. Diakses pada 1 Oktober 2023 melalui <https://blogs.loc.gov/law/2021/06/100-years-of-womens-suffrage-in-sweden/>

- International IDEA. (2002). Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. Jakarta: AMEPRO.
- Kemenko PMK. (2021). Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa. kemenko.go.id. Diakses pada 4 Desember 2023 melalui <https://www.kemkoptk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>
- Larasati, P. (2018). Perspektif Feminisme Terhadap Perubahan Kebijakan Terkait Krisi Pengungsi Periode 2014-2017. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Prabowo, A. W (2018). "Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Madani (Studi Atas Tafsir Al-Kasyaf Karya Syaikh Zamakhsyari)." Stain Jurai, Siwo Metro.
- Rangkuti, M. (2023, Juni 23). Apa itu Demokrasi?. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses pada 1 Oktober 2023 melalui <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-demokrasi/>
- Siregar, P., R. (2021). Upaya Swedia Dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender Melalui Kebijakan Luar Negeri Feminis 2014-2019. Skripsi. Universitas Sriwijaya
- Swedish Institute. (2023). Gender Equality. Sweden. Se. Diakses pada 1 Oktober 2023 melalui <https://sweden.se/life/equality/gender-equality>
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. Politea: Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun) 2018, hlm. 63-83
- World suffrage timeline', URL: <https://nzhistory.govt.nz/politics/womens-suffrage/world-suffrage-timeline>, (Ministry for Culture and Heritage), updated 27-Apr-2023